

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN
(STUDI KASUS UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN HEWAN
PENULAR RABIES)**

Oleh

Bella Etika Sari

bellaetikasari@gmail.com

Pembimbing : Febri Yuliani

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Rabies disease is a contagious and zoonotic disease, it can infect humans through the bite of an animal infected with rabies. Rabies disease is caused by a zoonotic virus meaning rabies disease can be transmitted from animal to human, through the bite of Rabies (HPR). Kuantan Singingi Regency has a high population of rabid animals and wild animal rabies and many cases of bites caused by HPR. If not handled optimally the level of bite cases will increase. Therefore it is necessary to see the implementation of Regional Regulation number 10 of 2009 on Animal Health Maintenance. The theory used in this research is Policy Implementation. Especially the theory of Jan Merse to see the implementation of Regional Regulation number 10 of 2009 on Animal Health Maintenance related to government efforts in the prevention of rabies transmitting animals. This research uses qualitative descriptive method with triangulation technique, data collection with observation, interview and documentation. The result of the research is the implementation of the regulation of Kuantan Singingi Regency Number 10 Year 2009 on Animal Health Maintenance related to the efforts of the government in controlling rabies transmitters have been done but there are some that have not been done, among others: facilities, public participation is still lacking, and information obtained from it the factors that influence the implementation of the implementation of the Regulation of Kuantan Singingi Regency Number 10 Year 2009 on Animal Health Maintenance related to the government's efforts to control rabies transmitted animals include: limited funds, facilities, and low public and cultural awareness.

Keywords: Rabies Disease, Animal Transmitting Rabies, Policy Implementation

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun Pemerintah pusat pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri selama apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah disesuaikan dengan pasal 18 Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 artinya bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintah daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menerapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya). Maka dari itu, untuk mengurus kebutuhan daerah masing-masing maka di bentuklah Peraturan daerah.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan kewenangan dan bisa menyelenggarakan otonominya sendiri. Pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi berada di Taluk Kuantan yang mempunyai hak untuk menentukan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pelaksana otonomi daerah menerbitkan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban serta menghindari kerusakan serta menghindari masyarakat dari penyakit menular rabies yang disebabkan oleh anjing, kucing, kera di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sehingga peraturan ini seharusnya memberikan intervensi yang sangat mempengaruhi pemilik hewan menjaga ketertiban terutama kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh hewan penular rabies di Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas peternakan sebagai implementor kebijakan mengakui sangat sulit melaksanakan penertiban hewan penular rabies karena budaya masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan sebagian Kecamatan berlawanan dengan kebijakan ini.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di dalam merencanakan suatu kebijakan ini tidak melihat sosial budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sehingga apa yang telah direncanakan sangat kecil kemungkinannya tercapai serta pengawasan yang sangat minim sekali. Sesuatu dapat berjalan efektif, proses implementasi harus merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Proses yang dimaksud adalah penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, sampai pada evaluasi kebijakan **(Sujianto, 2008 : 31)**

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan, perlu dilakukan penertiban pemeliharaan hewan penular rabies (HPR) untuk menciptakan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban kota, jalan raya, fasilitas umum dan pemukiman dari gangguan hewan

penular rabies serta terhindarnya masyarakat dari penyakit rabies.

Tujuan yang diharapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian pada hewan dan manusia. Namun maksud dari kebijakan yang dibuat tersebut belum mampu mewujudkan tujuan dari peraturan daerah tersebut, salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap hewan.

Berikut ini data populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Akhir Populasi Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Anjing	Kucing	Kera
1	Kuantan Tengah	1293	4587	72
2	Pangean	492	1540	7
3	Logas Tanah Darat	786	1345	2
4	Hulu Kuantan	226	303	11
5	Inuman	383	735	55
6	Singingi Hilir	336	2100	69
7	Kuantan Mudik	1442	2402	32
8	Benai	620	628	8
9	Kuantan Hilir	1394	5655	8
10	Cerenti	518	560	7
11	Gunung Toar	367	1961	58
12	Singingi	492	59	24
13	Sentajo Raya	482	1330	22
14	Kuantan Hilir Seberang	675	1887	1
15	Pucuk Rantau	1114	545	0
Jumlah		10620	25637	376

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kuansing, 2017

Tabel 1.1 menunjukkan data populasi hewan penular rabies dari tahun 2012-2017 sama, karena di Dinas Pertanian khususnya di bidang Peternakan hanya melakukan pendataan hewan hanya sekali dalam lima tahun. Dari data dapat dilihat

bahwa tingkat populasi hewan penular rabies di masing-masing kecamatan sangat tinggi. Hewan penular rabies yaitu anjing jantan berjumlah 7.676 ekor dan betina berjumlah 2.944 ekor, sedangkan untuk hewan penular rabies yaitu kucing jantan berjumlah 8.974 ekor dan betina berjumlah 16.663 ekor. Kemudian hewwan penular rabies yaitu kera jantan berjumlah 254 ekor dan betina berjumlah 122 ekor. Jadi populasi hewan penular rabies yang paling banyak ada di Kecamatan Kuantan Mudik yaitu sebanyak 1442 ekor.

Dari data tersebut populasi hewan penular rabies yang paling banyak ialah kucing. Meskipun populasi kucing yang paling tinggi, faktor utama penyebar virus rabies di Kabupaten Kuantan Singingi adalah anjing. Hal ini disebabkan oleh karena banyaknya masyarakat yang memelihara anjing. Faktor yang lain seperti kucing dan kera juga dimasukkan sebagai faktor resiko, sekalipun peluang sebagai pembawa dan penyebar rabies jauh lebih kecil. Manusia paling sering tertular rabies lewat anjing, tetapi sangat jarang tertular dari kucing, kera, atau hewan lain. Hewan tersebut biasa dipelihara untuk berburu maupun sebagai penjaga rumah. Banyaknya anjing yang dipelihara dapat membuat populasi pertumbuhan hewan tersebut semakin meningkat

Berdasarkan observasi dan data yang diperoleh maka peneliti mengambil satu Kecamatan yang penulis teliti yaitu di Kecamatan Kuantan Mudik, karena di Kecamatan Kuantan Mudik tingkat populasi hewan penular rabies dan kasus gigitan hewan penular rabies sangat tinggi terjadi di daerah tersebut. Sehingga perlu upaya pemerintah dalam penanganan kasus hewan penular rabies.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengimplementasian mengenai

pelaksanaan upaya pemerintah dalam penanggulangan hewan penular rabies tersebut serta kelemahan dan upaya dalam penyelenggaraan peraturan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian ini adalah

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN (STUDI KASUS UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN HEWAN PENULAR RABIES)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Kabupaten Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies) ?

Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebijakan publik tentang upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat tentang hal yang harus dilakukan dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies).
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian yang sama.

Konsep Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian dari kebijakan publik dan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu. **Nugroho (2008 : 55)** Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.

Model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh **Jan Merse** dalam **Tahir (2015:93)** menegaskan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Informasi
- 2) Isi kebijakan
- 3) Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik)
- 4) Pembagian potensi

Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam pelaksana program. Pengasan di atas membuktikan bahwa karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan dalam program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder*.

Menurut **Grindle** dalam **Nugroho (2014 : 671)** ditentukan oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (siapa) pelaksana program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

Sementara itu konteks impelementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

George Edward III dalam **Subarsono (2005 : 90)** implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

a. Faktor Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

1. Transmisi adalah faktor utama dalam komunikasi, karena transmisi merupakan proses penyampaian suatu kebijakan yang sudah dibuat. Sebuah peraturan atau kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila komunikasi antar pihak yang diberi tugas berjalan baik atau dalam kata lain adanya komunikasi yang baik antar individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok.
2. Clarity
Clarity adalah kejelasan komunikasi yang diterima oleh para implementor agar terlaksananya suatu kebijakan. Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus diikuti oleh kejelasan dari tujuan kebijakan itu, hal ini diharapkan agar tidak terjadinya multi-interpretasi tentang kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Konsistensi
Konsistensi adalah perintah yang diberikan dalam pelaksanaan secara konsisten. Jika impelementasi kebijakan ingin berjalan baik dan efektif maka perintah-perintah yang diberikan harus jelas dan tidak bertentangan dengan para pelaksana kebijakan.

b. Faktor Sumberdaya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud dari sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial dan fasilitas yang tersedia. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

1. Staf

Staf adalah sumber daya manusia yang menjadi pelaksana sebuah kebijakan. Staf secara kuantitas harus cukup sehingga akan membuat sebuah kebijakan terlaksana dengan baik.

2. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana menunjang keberhasilan sebuah kebijakan.

3. Dana

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan baik berupa dana administrasi maupun dana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

- c. Faktor Sikap pelaksana (disposisi)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

1. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.

2. Kognisi, yaitu pemahaman para implementor terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
3. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh setiap implementor.

- d. Faktor Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena-fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu di Kecamatan Kuantan Mudik. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Puskesmas Kuantan Mudik karena berdasarkan data yang diperoleh tingkat gigitan yang disebabkan oleh penular rabies jadi penulis tertarik untuk meneliti di daerah ini.

3. Informan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan peneliti *Key Person*. Peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*.

- a. Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kuansing
- b. Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuansing
- c. Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Bidang P2P Puskesmas Kecamatan Kuantan Mudik
- e. Masyarakat Kuantan Mudik

4. Jenis Data dan sumber data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas maka data yang diperlukan antara lain :

- a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung di dapat dari obyek penelitian melalui informan penelitian dimana data atau informasi yang di dapat berupa hasil wawancara yang mendalam dan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies).

- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapat melalui sumber kedua, dimana data diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai literatur, baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau kantor terkait yaitu mengenai:

- a. Profil Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Profil Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.

- d. Profil Dinas Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi.
- e. Dokumen-dokumen lainnya yang dianggap penting dalam menunjang analisis hasil penelitian ini nantinya.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yakni :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua dinatara yang terpenting yaitu proses-proses pengamatan dan ingatan. Tujuan observasi adalah untuk memastikan sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian, mengenai sikap institusi terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di bidang penertiban hewan penular rabies.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung terhadap informan meliputi langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi yang ingin peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu profil data Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, data populasi hewan penular rabies dari tahun 2014-2016, data kasus hewan penular rabies di Kecamatan Kuantan Mudik, data korban gigitan hewan penular rabies serta dokumen berupa gambar atau foto tentang hewan penular rabies.

6. Analisa data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012 : 89).

Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari instansi terkait dan sumber-sumber lain. kemudian data-data tersebut dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif atau dijabarkan sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Untuk lebih meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Secara umum triangulasi merupakan kegiatan *check, recheck* dan *crosscheck* antara data dengan observasi penelitian di lapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama di lapangan dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies).

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies)

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Sehingga keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut teori yang dikemukakan oleh Jan Merse, yang mengatakan dalam pandangannya Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Informasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Jan Merse adalah informasi. Informasi merupakan sumber-sumber yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, tanpa adanya informasi kegiatan tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan. Implementor atau para pelaksana harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Informasi memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.

Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran atau *output* kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiatifkan oleh pemerintah tetapi masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Informasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan.

2. Isi Kebijakan

Variabel kedua atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah isi kebijakan. Kepentingan kelompok sasaran, artinya sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan dalam hal ini khususnya yang menjadi perhatian adalah pemilik hewan. Menurut Grindle dalam Agustino (2014 : 154) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri yaitu isi kebijakan atau *content of policy*. Isi kebijakan mencakup :

a. Manfaat, artinya manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran dalam hal ini adalah dampak yang dapat diterima oleh pemilik hewan setelah dikeluarkannya peraturan tersebut. Isi kebijakan ini berupaya untuk

menjelaskan bahwa di dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dalam implementasi kebijakan.

Menurut **Gindle** dalam **Sujianto (2008:49)** suatu kebijakan atau program menjanjikan keuntungan/manfaat yang jelas bagi kelompok sasaran, maka dukungan terhadap implementasi program akan mudah diperoleh. Begitu pula sebaliknya, jika kelompok sasaran tidak dapat memahami keuntungan/manfaat yang bakal diperoleh dari suatu program, maka implementor harus mampu menciptakan opini bagi kelompok sasaran untuk meyakinkan mereka terhadap keuntungan/manfaat yang akan diraih.

- b. Perubahan yang diinginkan, artinya derajat perubahan yang diinginkan. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Maksud dari isi kebijakan yang ingin dijelaskan adalah seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai oleh pelaksana kebijakan melalui suatu implementasi kebijakan serta harus mempunyai arah yang jelas. Dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies ingin adanya perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan, artinya kebijakan yang dibuat melibatkan aktor kebijakan yang tepat sehingga kebijakan yang dibuat sudah tepat sehingga jika diterapkan mudah diterima dan dilaksanakan.
- d. Siapa pelaksana program, artinya pihak terkait yang terlibat. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Para pelaksana ini yang menentukan apakah implementasi sesuai dengan tujuan yang telah dicapai dan apakah

peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sudah diimplementasikan dengan baik.

- e. Sumberdaya, artinya adalah sumberdaya yang dikerahkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya maksimal dan berjalan dengan baik. Untuk peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies diperlukan tenaga ahli yang paham secara keseluruhan dan menguasai permasalahan tersebut.

3. Dukungan Masyarakat

Variabel atau faktor ke tiga yang mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut Jan Merse adalah Dukungan Masyarakat. Dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

4. Pembagian Potensi

Variabel atau faktor ke empat yang mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut Jan Merse adalah Pembagian Potensi. Pembagian potensi merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Menurut **Abidin** dalam **Tahir (2015:58)** mengatakan kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan. Kewenangan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies)

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, implementasi peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 10 tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (studi kasus upaya pemerintah dalam penanggulangan hewan penular rabies) belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Adapun faktor-faktor penghambat proses implementasi peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 10 tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (studi kasus upaya pemerintah dalam penanggulangan hewan penular rabies) sebagai berikut :

1. Keterbatasan Dana

Dana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 10 tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan. Tanpa adanya dana semua kegiatan yang akan dicapai tidak akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena dana merupakan pendukung dari semua kegiatan dalam melaksanakan peraturan Bupati serta memberikan manfaat yang baik di masa mendatang.

2. Fasilitas

Selain biaya fasilitas merupakan faktor pendukung dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan. Fasilitas digunakan untuk menangkap hewan penular rabies yang berkeliaran ditempat-tempat umum. Fasilitas bukan hanya berperan penting tetapi juga turut menunjang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 10 tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan serta penanggulangan hewan penular rabies yang sedang dilakukan. Disisi lain, Fasilitas juga menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan, apabila fasilitas cukup maka kegiatan akan berjalan lancar begitu juga sebaliknya.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Dampak kebijakan yang paling nyata adalah adanya perubahan kondisi yang dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Tetapi upaya pemerintah itu tidak akan terlaksana dan terwujud dengan baik jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat disekitarnya.

4. Budaya

Faktor yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan yaitu budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies) sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies) sudah berjalan dengan lancar, dari segi penyampaian informasi secara jelas dan langsung kepada kelompok sasaran. Isi kebijakan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, karena dari segi sumberdaya fisik berupa fasilitas dalam pelaksanaan penanggulangan hewan penular rabies juga masih kurang. Dukungan masyarakat dalam

upaya penanggulangan hewan penular rabies masih terdapat kendala yaitu partisipasi masyarakat dalam memvaksinasi hewan penular rabies dan masyarakat membiarkan hewan penular rabies berkeliaran di tempat-tempat umum seperti jalan raya. Pembagian potensi atau pembagian wewenang sudah berjalan dengan baik. Jadi dengan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (studi kasus upaya pemerintah dalam penanggulangan hewan penular rabies) dari pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala yaitu dari segi sumberdaya yaitu fasilitas, informasi dan anggaran secara khusus agar kedepannya berjalan dengan terencana.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (studi kasus upaya pemerintah dalam penanggulangan hewan penular rabies)

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan dilapangan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (studi kasus upaya pemerintah dalam penanggulangan hewan penular rabies) yaitu : dari keterbatasan dana atau biaya dalam hal ini adalah anggaran yang diperlukan untuk penanggulangan hewan penular rabies dan dari sumberdaya fisik berupa fasilitas atau alat-alat yang disediakan masih kurang dalam implementasi peraturan Daerah nomor 10 tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (studi kasus upaya pemerintah dalam penanggulangan hewan penular rabies) dan masih kurangnya penyampaian informasi . Selain itu juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Rendahnya kesadaran masyarakat

karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan dalam melepaskan hewan penular rabies di tempat-tempat umum.

SARAN

Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat di pertimbangkan sebagai bahan masukan mengenai implementasi peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan (Studi Kasus Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Penular Rabies) serta mengeani Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies, peneliti memberikan saran :

1. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan mengusahakan sumber daya yang tersedia terpenuhi supaya pelaksanaan kebijakaan dapat berjalan sesuai dengan baik.
2. Untuk mendukung pelaksanaan peraturan Bupati tersebut sebaiknya dinas pertanian bidang peternakan membuat program khusus untuk penanggulangan hewan penular rabies.
3. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus mengevaluasi lagi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies, karena isi dan judul tidak sinkron atau tidak sesuai.
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan vaksinasi gratis kepada hewan penular rabies.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

AR, Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan*

Evaluasi Kinerja. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan*. Alfabeta : Bandung

Nugroho, Riant.2003. *Kebijakan Publik Formulasi Impelementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

_____.2008 . *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

_____.2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

_____.2017. *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publi, Kimia Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

S, Alex. *Panduan Lengkap Memelihara Anjing & Kucing : Kiat Ampuh Agar Binatang Peliharaan Tetap Sehat, Terawat dan Prima*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Satori, Djam'an,dkk. 2012. *Metode Penelitian Kalitatif*. Banduung : Alfabeta

Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

_____. 2011. *Analisis Kebijakan publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Soeharsono. 2002. *Zoonosis: Penyakit Menular Dari Hewan Ke Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik "konsep dan Aplikasinya"*. Pekanbaru : Alaf Riau

Sujianto, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. (Studi implementasi Pembangunan*

- Perkebunan Daerah Transmigrasi Riau*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta : Bandung
- Wahab, Sollichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Trihandoko, “*Implementasi Kebijakan Program Pemebrdayaan Masyarakat Kelirahan (PPMK) di Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*” Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan/ Dokumentasi

- Peratuan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies

Jurnal

- Mega Agustin, “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies Tahun 2013*” Jurnal, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2015. Di akses tanggal 19 mei 2018
- Richo Rahgia Syahputra, “*Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2014*” Jurnal. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2014. Di akses tanggal 8 Desember 2017.
- Syofian, “*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pentiban Pemeliharaan Ternak dan Hewan Menular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi*” Skripsi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2011.